

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak negara yang menerapkan prinsip demokrasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip demokrasi. Dalam sebuah negara peran dan usaha warganya sangat diperlukan karena menjadi satu titik penting bahwa negara tersebut didukung oleh warga negaranya. Kesetaraan gender merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah partai politik. Perempuan masih sering dianggap kurang mampu atau kurang cocok dalam dunia politik. Laki-laki masih sering berfikir bahwa perempuan yang sempurna adalah perempuan yang berada di rumah menjadi ibu rumah tangga yang baik dan merawat anak dengan baik tanpa harus terlibat aktif dalam dunia politik. Pemikiran seperti itulah yang membuat perempuan masih dianggap posisinya rendah atau dibawah laki-laki.

Membicarakan tentang masalah perempuan tidaklah akan habis, dikarenakan banyak kasus yang melibatkan tentang perempuan. Kasus tersebut bisa dikategorikan kasus dalam hal baik dan ada pula kasus yang buruk, paling dominan disini adalah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Banyak bukti yang menyebutkan bahwa posisi perempuan masih berada dibawah laki-laki. Sebagai contoh, kasus kekerasan di rumah tangga, TKW, PRT, serta eksploitasi perempuan. Dengan keadaan seperti itu, perjuangan menuju emansipasi perempuan sangat diperlukan. Para

perempuan harus memperjuangkan dirinya untuk bisa mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Serta perempuan harus bisa meninggalkan sebutan lama yang dilakukan oleh para laki-laki seperti sumur, dapur dan kasur.

Tuntutan perempuan pada saat ini mulai berkembang, mereka telah ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Perempuan menginginkan tersedianya ruang untuk mereka menyuarakan hak-haknya untuk berpendapat ataupun hak untuk menyampaikan kepentingan perempuan. Namun, untuk dapat sampai meraih keinginan itu dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah seperti adanya keseimbangan jumlah perempuan dan laki-laki yang duduk di kursi parlemen dengan jabatan politik yang diperlukan.

Melihat fenomena tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” (Undang-Undang No.12 Tahun 2004). Adanya kebijakan itu menjadi langkah awal dalam meraih kesetaraan gender di bidang politik. Dengan begitu memberikan harapan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk maju ke dunia politik dan menempati posisi yang penting yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk mewakili kepentingan perempuan.

Tabel 1.1 Keterwakilan Perempuan Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Legislatif Perempuan	Jumlah Kursi	Persentase
1.	DPD	31	23,48
2.	DPR	97	17,32

Sumber: Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia 26 September 2014

Melihat tabel diatas jumlah kursi yang didapatkan oleh perempuan masih berada jauh dibawah kuota yang telah diterapkan pemerintah. Kuota yang diidam-idamkan adalah 30% sedangkan pada tabel diatas masih dibawah 30%. Ini membuktikan bahwa kepercayaan rakyat terhadap wakil perempuan masih kurang.

Tabel 1.2 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, Tahun 1955-2014

Periode	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	256	94,12	16	5,88
1971	429	93,26	31	6,74
1977	423	91,96	37	8,04
1982	418	90,87	42	9,13
1987	441	88,20	59	11,80
1992	438	87,60	62	12,40
1997	442	88,40	58	11,60
1999	456	91,20	44	8,80
2004	485	88,18	65	11,82
2009	460	82,14	100	17,86
2014	463	82,68	97	17,32

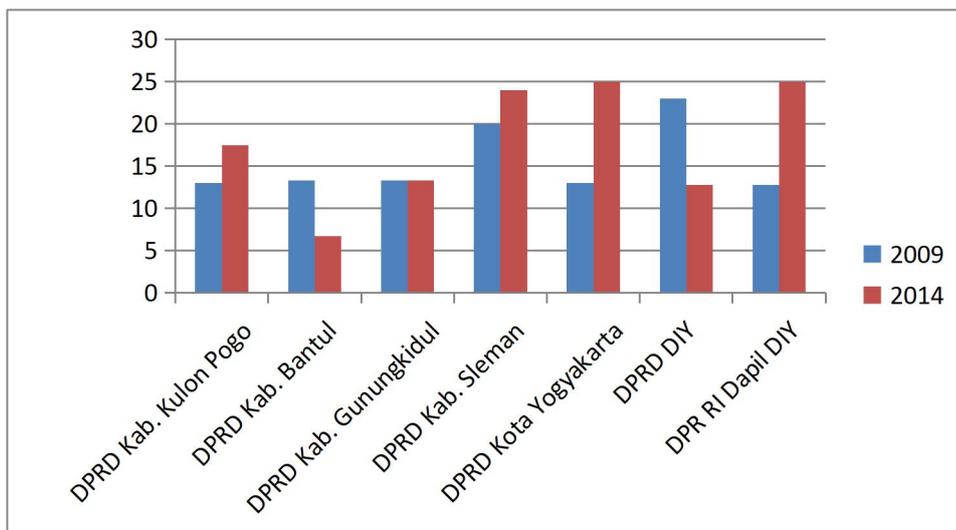
Sumber: Komisi Pemilihan Umum, Data Dikutip Dari Publikasi Statistik Indonesia 2015

Melihat tabel diatas bahwa setiap tahun keterwakilan perempuan yang duduk di kursi DPR mengalami fluktuasi. Namun setidaknya angka keterwakilan itu terus bertambah, ini membuktikan bahwa minat perempuan di politik semakin meningkat. Namun di tahun 2014

keterwakilan perempuan cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terus meningkat.

Berdasarkan data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan, jumlah perempuan pada saat ini di Provinsi DIY jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki yaitu 1.823.121 sedangkan jumlah laki-laki yaitu 1.794.963. Jika dilihat dari segi kuantitas jumlah perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki namun untuk keterwakilan perempuan yang duduk di kursi legislatif jumlahnya masih sangat sedikit (Diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY). Sesungguhnya peran perempuan itu sungguh luar biasa, karena mereka bisa melaksanakan peran gandanya sebagai seorang ibu bagi yang sudah menikah dan menjadi seorang perempuan yang aktif di anggota legislatif.

Grafik 1.3 Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2014



Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, ternyata hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 2 kursi (25%) di DPR RI Dapil DIY, 7 kursi (12,73%) di DPRD DIY, 7 kursi (17,50%) di DPRD Kabupaten Kulon Progo, 3 kursi (6,67%) di DPRD Kabupaten Bantul, 6 kursi (13,33%) di DPRD Kabupaten Gunungkidul, 12 kursi (24%) di DPRD Kabupaten Sleman, dan 10 kursi (25%) di DPRD Kota Yogyakarta. Bila dibandingkan dengan hasil Pemilu Legislatif 2009, keterwakilan perempuan meningkat untuk DPR RI Dapil DIY tetapi menurun untuk DPRD DIY. Sementara di tingkat kabupaten/kota persentase anggota legislatif perempuan meningkat di Kulonprogo dan Sleman sedangkan di Bantul dan Kota Yogyakarta menurun dan untuk Gunungkidul tetap (Sumber: Diolah dari data KPU DIY)

Tabel 1.3 Jumlah Persentase Keterwakilan Perempuan Setiap Partai di DIY Pemilu Tahun 2019

No	Nama Partai	Persentase Keterwakilan Perempuan						
		DIY 1	DIY 2	DIY 3	DIY 4	DIY 5	DIY 6	DIY 7
1	Partai Kebangkitan Bangsa	42,86	71,43	83,33	42,86	33,33	50,00	45,45
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	42,86	57,14	50,00	42,86	44,44	50,00	30,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42,86	42,86	33,33	42,86	44,44	50,00	36,36
4	Partai Golongan Karya	50,00	42,86	33,33	42,86	50,00	37,50	50,00
5	Partai Nasdem	42,86	42,86	33,33	50,00	44,44	37,50	36,36
6	Partai Gerakan Perubahan	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

	Indonesia							
7	Partai Berkarya	40,00	42,86	33,33	60,00	37,50	33,33	40,00
8	Partai Keadilan Sejahtera	42,86	42,86	33,33	57,14	33,33	37,50	36,36
9	Partai Persatuan Indonesia	50,00	66,67	50,00	100,00	33,33	40,00	50,00
10	Partai Persatuan Pembangunan	0,00	50,00	33,33	50,00	50,00	33,33	100,00
11	Partai Solidaritas Indonesia	33,33	50,00	0,00	0,00	33,33	33,33	50,00
12	Partai Amanat Nasional	42,86	42,86	33,33	57,14	62,50	50,00	45,45
13	Partai Hati Nurani Rakyat	50,00	0,00	100,00	66,67	100,00	0,00	50,00
14	Partai Demokrat	57,14	57,14	50,00	42,86	33,33	37,50	45,45
15	Partai Bulan Bintang	66,67	50,00	50,00	33,33	33,33	33,33	33,33

Sumber: diolah dari data KPU

Dari tabel diatas terlihat bahwa PKS sudah memenuhi angka keterwakilan 30% bahkan justru bisa lebih dari 30% disetiap Dapilnya. Persentase yang lumayan tinggi untuk PKS. Dari data KPU tahun 2019 secara nasional jumlah caleg perempuan pada PKS adalah 32,89%.

Tabel 1.4 Jumlah Keterwakilan Perempuan PKS DIY Tahun 2019

No.	Nama Kabupaten/Kota	Persentase
1.	Bantul	31,81
2.	Gunungkidul	31,25
3.	Kota Yogyakarta	34,61
4.	Kulon Progo	33,33
5.	Sleman	36,36

Sumber: diolah dari data KPU

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera telah menerapkan kebijakan kuota 30% perempuan di

dalam Lembaga Legislatif. Secara jumlah PKS justru melebihi kuota 30% perempuan.

Tabel 1.5 Susunan Anggota DPRD tahun 2014 dari PKS

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	DPRD DIY	6	-
2.	DPRD Sleman	6	-
3.	DPRD Bantul	4	-
4.	DPRD Gunungkidul	5	-
5.	DPRD Kulonprogo	5	-
7.	DPRD Kota Yogyakarta	3	-

Sumber: diolah dari data KPU

Hal tersebut tentunya menjadi suatu pertanyaan besar terhadap keberadaan perempuan di dalam kepengurusan DPW DIY, karena berdasarkan data diatas dari Partai PKS untuk perwakilan perempuan tidak ada yang lolos untuk menduduki kursi DPRD tingkat Provinsi ataupun DPRD tingkat Kabupaten pada pemilu 2014. Berdasarkan data dari KPU untuk caleg perempuan PKS untuk calon anggota dewan DPRD DIY tergolong tinggi yaitu sebanyak 23 orang dengan persentase 41,81%.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus di DPW PKS DIY. Karena penulis merasa tertarik dengan rekrutmen Caleg Perempuan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keterwakilan perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera untuk Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30% di Lembaga Legislatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera untuk Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30% di Lembaga Legislatif?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019 di Provinsi DIY?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui rekrutmen politik terhadap Caleg Perempuan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini ada tiga jenis manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat bagi Penulis

Manfaat ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan serta pengalaman yang begitu sangat berharga dalam menganalisis

rekrutmen politik caleg perempuan dalam memenuhi kuota 30% di PKS Provinsi DIY Tahun 2019.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lain tentang rekrutmen politik caleg perempuan dalam memenuhi kuota 30%.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi perempuan agar lebih paham akan peran pentingnya dalam dunia politik serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pendidikan yang mempunyai pusat penelitian mengenai rekrutmen perempuan dalam partai politik, yaitu: Partai Politik, LSM, atau institusi lainnya yang telah berhubungan langsung dengan pengembangan studi perempuan dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

1.4 Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis	Tahun	Isi
1.	Analisis Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30% Di Lembaga Legislatif 2004 (Studi	Djuwarti Hud	2008	Penelitian ini lebih memfokuskan tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses rekrutmen 1. Faktor Internal 2. Faktor Eksternal Strategi untuk peningkatan Caleg perempuan Partai Golkar 1. Mengadakan pengkaderan khusus perempuan muda 2. Melakukan diskusi-diskusi tentang pendidikan politik 3. Mengadakan seminar-seminar tentang

	Kasus DPD Partai Golkar Provinsi DIY)			perempuan 4. Memasukkan perempuan dalam kepengurusan partai Golkar 5. Merencanakan mengajukan sebuah kebijakan khusus perempuan tentang caleg perempuan di setiap Dapil 6. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan kelompok organisasi perempuan.
2.	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPC PDIP Kota Yogyakarta Periode Tahun 2010-2015	Dwi Marinda Sari	2012	Penelitian ini lebih memfokuskan tentang keterwakilan perempuan 1. Keterwakilan perempuan dalam struktural partai masih rendah 2. Dalam AD ART tidak ada perbedaan dalam proses rekrutmen dalam memberikan sosialisasi antara laki-laki dan perempuan 3. Dalam posisi struktural kepengurusan partai, kader perempuan masih cenderung dilibatkan dalam hal-hal yang berbau keuangan atau seksi keputrian 4. Faktor penghambat keterwakilan perempuan dikarenakan faktor yang terjadi dalam individu perempuan sendiri yaitu kurang percaya diri.
3.	Partisipasi Politik Perempuan Pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan (Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA)	Susi Susanti dan Adelita Lubis	2015	Penelitian ini memfokuskan kepada rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di DPD Kota Medan tahun 2009-2014 karena pemenuhan kuota 30% caleg perempuan yang belum serius diterapkan oleh partai-partai di Indonesia. Faktor yang menyebabkan adalah faktor budaya dan faktor kurang dikenalnya perempuan-perempuan dari PKS.
4.	Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP Dan PKS	Cholida Eka Anggraini, Joko Sutarso, Budi Santoso	2014	Penelitian ini memfokuskan kepada Strategi komunikasi politik eksternal dengan menggunakan program-program yang diadakan oleh Partai. PDIP dengan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo dan Bantuan Pendidikan Masyarakat

	Kota Surakarta			Kota Solo. PKS dengan program Pos Wanita Keadilan, Sejahtera Study Club (bimbingan belajar gratis), Cluster Business (kelompok bisnis), Pembinaan Remaja Masjid, Senam Nusantara dan komunitas hobi. Dalam proses rekrutmen caleg PDIP dilakukan penelitian yang berupa penilaian, survei dan riset kelayakan tiap calon yang diajukan oleh masyarakat, caleg terpilih melalui pertimbangan dari pengabdian anggota kepada partai. PKS menggunakan pemilihan umum internal kader disetiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legislatif.
5.	Pola Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Penentuan Caleg Perempuan Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Grobogan	Pradita Tyas Putri Andari	2014	PKS menggunakan pola rekrutmen politik tertutup dimana kader tidak boleh mencalonkan diri tetapi dicalonkan oleh partai. Partai menggunakan pendekatan individu, setiap tahap perekrutan tidak dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui sistem penilaian yang dilaksanakan partai dalam menentukan caleg. PKS menekankan pada kader internal partai yang dicalonkan menjadi caleg, jika kuota sudah cukup diisi oleh kader maka partai tidak merekrut caleg eksternal. Rekrutmen caleg perempuan non kader PKS Kabupaten Grobogan yaitu dengan silaturahmi, pengurus partai terutama ketua bersilaturahmi kerumah kandidat caleg non kader tersebut dengan maksud untuk mencalonkannya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus kepada Rekrutmen politik Caleg perempuan dalam memenuhi kuota 30% di PKS Provinsi DIY tahun 2019 dengan menggunakan teori dari Norris dan Lovenduski yaitu *Supply and Demand model of recruitment*.

1.5 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan teori-teori yang digunakan dalam suatu penelitian dalam rangka menjelaskan teori secara sistematis dan ilmiah. Kerangka dasar teori merupakan informasi ilmiah yang diperlukan oleh seorang peneliti untuk membahas permasalahan yang telah diajukan (Zaenuri). Adapun kerangka dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Partai Politik

Partai politik itu lahir pertama kali di negara-negara Eropa Barat. Dengan adanya gagasan yang luas tentang rakyat yang perlu diikutsertakan dan diperhitungkan dalam proses politik, maka partai-partai politik itu lahir secara spontan serta berkembang secara pesat menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah (Sunggono, 1992: 7)

Untuk mengetahui arti dari partai politik sebaiknya harus paham terlebih dahulu apa arti dari partai dan apa arti dari politik. Dalam kamus politik, yang dimaksud partai adalah sebagai perkumpulan atau sekelompok orang yang seases, sehaluan, dan setujuan dalam bidang politik dan menurut Roy C.Marcidis yang

dimaksud partai adalah sebuah alat untuk memperoleh suatu kekuasaan dan sebagai alat untuk memerintah (Amal, 1988: 1). (Budiardjo, 2003: 8) Politik merupakan suatu macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau disini disebut Negara yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem politik itu dan untuk melaksanakan tujuan-tujuan sistem politik itu.

Dengan demikian arti partai politik secara baik merupakan suatu alat yang baik untuk menggerakkan rakyat, mewakili kepentingan rakyat banyak dan menyediakan sarana pra sarana secara lengkap yang berguna untuk kepentingan negara tersebut serta terbentuk secara spontan yang berguna sebagai jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah.

Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah sekumpulan orang yang tersusun secara rapi yang dipersatukan dengan adanya persamaan ideologi yang bertujuan untuk mempertahankan dan mencari kekuasaan di dalam pemilihan umum yang berguna untuk mewujudkan alternative kebijakan yang telah disusun (Surbakti, 1992: 116).

Ada banyak pengertian mengenai definisi partai politik menurut para ahli, yaitu :

a. R.H Soltau

Partai politik merupakan kumpulan warga negara yang telah terorganisir secara baik, yang bertindak sebagai satu

kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan yang telah ada untuk memilih serta bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kewajiban yang bersifat umum untuk mereka (Budiardjo, 2003: 161).

b. Carl J.Friedrich

Partai politik adalah sekumpulan manusia yang terorganisir secara ideal dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan sebuah partai serta berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang adil baik yang bersifat materil ataupun non materil (Budiardjo, 2003: 161).

c. Sigmun Neumann

Partai politik adalah sebuah organisasi yang terdiri dari para pelaku-pelaku politik yang sifatnya aktif didalam masyarakat seperti mereka memberikan perhatian secara terpusat pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk mendapatkan suatu dukungan penuh dari rakyat dengan banyak kelompok yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda (Kusnardi dan Bintang R.saragih, 1988: 267).

d. Jean Blondel

Partai politik adalah suatu kelompok anggota yang bersifat terbuka yang dimana berfokus dengan spektrum sosial-sosial kebijakan (Suryadi, 2005: 57).

Dari banyak definisi yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang mempunyai visi dan misi yang sama dimana terorganisir secara stabil dan terfokus dimana anggota-anggotanya mempunyai cita-cita yang baik yang berguna bagi suatu organisasi. Dengan demikian, partai politik merupakan suatu rombongan yang menghadirkan calon-calon yang dianggapnya pantas untuk dijadikan wakil rakyat bagi jabatan politik yang diperlukan untuk dipilih oleh rakyat secara langsung agar rakyat bisa memberikan penilaian secara sebeb-bebasnya yang menurutnya baik untuk mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Fungsi Partai Politik

Dalam dunia politik, partai-partai politik mempunyai beberapa fungsi yang dipaparkan oleh Miriam Budiardjo dalam A.Rahman H.I (2007: 103-104) :

a. Partai sebagai sarana komunikasi politik :

Salah satu dari sekian banyak tugas partai politik adalah menyalurkan aspirasi, pendapat yang begitu beragam dari warga masyarakat dan mengolah sedemikian baik agar tidak terjadi kesalahpahaman pendapat dalam masyarakat. Didalam masyarakat yang sangat luas, aspirasi serta pendapat masyarakat tidak

akan berguna apabila tidak ditampung dan dan diolah dengan baik.

Fungsi partai politik yaitu untuk membahas serta menyebarluaskan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu terjadi alur informasi dari atas kebawah dan dari bawah keatas, yang dimana partai politik menjalankan salah satu tugasnya sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan warga masyarakat atau yang memerintah dan yang diperintah.

Sedangkan menurut Sigmun Neumann yang berkaitan dengan komunikasi politik, partai politik adalah perantara yang menghubungkan ideologi sosial dengan pemerintah yang berkaitan dengan aksi politik di dalam masyarakat yang luas. Namun dalam pelaksanaan fungsi komunikasi politik menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang menyebabkan masyarakat resah karena memihak salah satu kelompok (Budiardjo, 2008: 406)

b. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik :

Partai politik menjalankan tugasnya sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Maksud dari sosialisasi politik adalah suatu proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi

terhadap fenomena politik yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat. Selain itu sosialisasi politik juga mencakup proses masyarakat dalam menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dari generasi yang sekarang ke generasi berikutnya.

Dengan hubungan tersebut partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Untuk usaha dalam mengatur dan menguasai pemerintahan dalam kemenangan di pemilihan umum, sebuah partai politik harus mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari masyarakat. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui sosialisasi ataupun ceramah, kursus kader, dan kursus penataran.

Menurut M. Rush (dalam A. Rahman H.I 2007: 103-104) sosialisasi politik merupakan proses dalam masyarakat yang belajar tentang sistem politik. Proses ini menentukan reaksi dan persepsi dari masyarakat terhadap fenomena politik.

c. Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik :

Partai politik mempunyai fungsi untuk mencari dan mengajak orang sebanyak mungkin yang memiliki bakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

Dengan demikian partai politik ikut memperluas partisipasi politik. Cara untuk merekrut yaitu dengan melalui kontak secara pribadi, secara persuasi dan lain sebagainya.

Selain itu juga berusaha untuk menarik golongan muda untuk dilatih serta dididik sedemikian rupa untuk menjadi kader yang bermanfaat dimasa yang akan datang untuk mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).

d. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik

Didalam negara demokrasi, persaingan yang ketat serta perbedaan yang beragam dalam masyarakat merupakan sesuatu yang dianggap wajar. Apabila sampai terjadi konflik maka disinilah tugas partai politik untuk menyelesaikan dan mengatasi konflik tersebut.

1.5.2 Rekrutmen Politik

Dimasa yang sekarang ini masyarakat yang sudah modern serta jumlahnya yang begitu banyak tidak akan berkumpul disuatu titik tempat untuk membahas persoalan tentang negara secara bersama-sama seperti yang pernah berlaku dalam sistem demokrasi dimasa zaman dahulu. Dengan demikian, untuk ikut berpartisipasi secara langsung dan secara aktif dalam urusan pemerintahan rakyat

harus memilih sekelompok orang atau wakil dari kalangan partai politik untuk mewakili kepentingan mereka. Konsep tersebut dapat terwujud apabila partai politik itu ada dan bisa mengajukan calon-calon yang berbakat untuk dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti adalah suatu pemilihan atau seleksi serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan sejumlah kepentingan dalam sistem politik yang pada umumnya di pemerintahan yang pada khususnya terhadap orang-orang yang mempunyai bakat yang lebih menonjol dan tugas partai politik untuk menyeleksi dan menempatkannya sebagai calon pemimpin (Surbakti, 1992: 118).

Pola Rekrutmen

Pola adalah suatu model, system, corak, bentuk yang bersifat struktur tetap serta rencana, dan cara kerja. Pola rekrutmen adalah berbagai macam praktek rekrutmen oleh suatu partai politik. Pada dasarnya setiap partai politik harus mempunyai prinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial mana saja. Namun seringkali sulit dihindari ada kecenderungan tipe partai politik mensejajarkan perbedaan dalam menetapkan konsep rekrutmen yang dianggap ideal oleh partainya (Erawan, Imawan dkk, 2010: 17).

Menurut Rush dan Althoff (Tangkilisan, 2003: 188) sistem rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara. Pertama, rekrutmen terbuka yaitu memberikan dan menyediakan kesempatan yang adil

dan sama bagi seluruh warga negara untuk ikut berpartisipasi secara langsung ataupun bersaing dalam proses penyeleksian yang diadakan. Yang menjadi dasar penilaian melalui proses dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Yang dimana setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat itu mempunyai peluang yang sama dalam ikut berkompetisi. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu kesempatan untuk ikut berpartisipasi atau masuk menduduki jabatan politik tidaklah berlaku sama bagi setiap warga negara yang artinya kesempatan ini hanya diberikan kepada individu-individu tertentu yang bisa mendapatkan kursi di dalam jabatan politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen politik :

1. Faktor politik. Faktor politik disini datangnya bisa dari politik nasional atau politik pusat dan politik lokal. Faktor politik nasional bisa berupa kepentingan politik dari pemerintah pusat terhadap proses pemilihan yang dilakukan. Sedangkan untuk proses politik lokal bisa berupa dukungan dari rakyat terhadap calon-calon yang telah diajukan (Waki, 2002).
2. Faktor sosial ekonomi, politik yang berhubungan dengan nilai didalam masyarakat oleh karena itu proses pemilihan juga harus mencerminkan kepentingan-kepentingan di kalangan elit politik. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum

pada umumnya akan menentukan secara signifikan pembuatan kebijakan atau proses politik tersebut di tingkat lokal. Partai atau kelompok yang memiliki kekuasaan akan memegang kendali dalam distribusi nilai-nilai dalam masyarakat (Waki, 2002).

3. Faktor sosial budaya. Faktor ini dimaksudkan yaitu berhubungan dengan tradisi atau budaya yang telah berkembang di masyarakat. Bisa dilihat dari tradisi atau budaya yang telah berkembang di masyarakat itu bersifat otoriter atau cenderung demokratis. Dimana proses tersebut akan mempengaruhi proses pemilihan di dalam masyarakat. Sedangkan nilai-nilai demokratis itu yang berkembang pada biasanya proses politiknya akan cenderung demokratis (Waki, 2002).

1.5.3 Pemilihan Umum

Menurut Adrew Reynolds, pemilihan umum merupakan suatu lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih para pembuat keputusan yang dimana masyarakat dapat terlibat secara aktif untuk setiap keputusan.

a. Sistem Pemilu

Douglas Mc Rae berpendapat bahwa sistem pemilu berkembang sejak 1989 yang berkaitan dengan konsekuensi politik dalam suatu negara. Sistem pemilu

sangat penting untuk dipelajari karena didalamnya ada berupa kepentingan-kepentingan politik. Sistem pemilu mencerminkan tentang bagaimana sistem politik di suatu negara berfungsi secara baik. Oleh sebab itu tergantung kepada sistem pemilu yang digambarkan sehingga akan menentukan mudah atau sulit seorang politisi untuk memenangkan kursi yang berada di lembaga legislatif. Sistem pemilu juga menentukan dalam kemampuan sejumlah anggota politik yang mencerminkan kecerdasan, kemampuan menganalisis pemerintahan yang kuat dan stabil. Benjuino Theodore menyatakan sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang diantaranya: Pertama, pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka. Kedua, suara dari pemilih diterjemahkan menjadi kursi.

Dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa sistem pemilu berfungsi sebagai struktur pembatas politik yang dapat diterima dengan memberikan insentif bagi para pemimpin politik untuk menampilkan daya tarik yang berbeda untuk menjaga warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban dari wakil rakyat yang dipilih oleh warga negara untuk mewakili mereka dalam pembuatan keputusan-keputusan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan pemilu

1. Figur Politik

Figur politik adalah suatu faktor penentu yang dimana merupakan konsekuensi atas berlakunya sistem pemilihan umum terhadap calon legislatif. Pemilihan tersebut membutuhkan persyaratan khusus yang diantaranya calon yang bersangkutan dikenal oleh publik. Dengan begitu keberadaan calon legislatif di setiap wilayah sangat menentukan banyaknya perolehan suara didalam partainya. Peran figur caleg ini mendorong suatu parpol untuk berlomba-lomba menjaring calon-calon yang sudah terkenal dan memiliki daya tarik khusus dimata publik. Yang paling diburu oleh partai politik adalah seorang artis terkenal yang memiliki daya tarik untuk membuat masyarakat tertarik terhadap parpol tersebut. Serta orang yang dianggap berkuasa di daerah yang mempunyai kekuasaan yang baik dari segi materi dan non materi akan dijadikan sebagai Caleg (Koirudin, 2004: 111).

2. Fanatik terhadap partai

Para pemilih tradisional yaitu para pemilih setia dari partai atau tokoh partai yang bersangkutan

akan tetap memberikan suaranya berdasarkan tokoh yang bersangkutan (Koirudin, 2004: 111).

3. Intensitas praktek politik uang

Kasus yang mempengaruhi kemenangan partai politik dalam pemilihan umum yaitu Intensitas praktek politik uang dalam pemilu legislatif. Para pemilih yang pragmatis untuk mendapatkan keuntungan seperti ini dalam hal materi seperti uang akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih suatu partai politik (Koirudin, 2004: 111).

4. Program partai tentang perbaikan ekonomi masyarakat

Suatu isu perbaikan ekonomi merupakan sesuatu unggulan yang berdiri dengan gagah, hal ini menjadikan bahwa program utama partai tentang perbaikan ekonomi akan banyak diperhatikan oleh seseorang pemilih. Hal ini dibuktikan pada zaman Presiden Soeharto yang berupa keinginan masyarakat yang menghendaki ekonomi (Koirudin, 2004: 111).

1.5.4 Model rekrutmen

Model rekrutmen bentuknya ada bermacam-macam tergantung ingin menggunakan model rekrutmen seperti apa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model rekrutmen dari teorinya Norris dan Lovenduski yaitu Model teori permintaan dan penawaran.

Model rekrutmen

Supply and demand model of recruitment (Norris and Lovenduski, 1993: 378). Dalam model rekrutmen ini ada berbagai aspek yang akan dibahas yaitu dimulai dari latar belakang masalah, sumber daya, dan motivasi. Yang dimana dari berbagai aspek didalamnya terdapat pokok bahasan sendiri-sendiri.

1. Latar belakang sosial:

a. Kelas Pekerjaan

Faktor yang paling penting dalam latar belakang sosial adalah kelas pekerjaan. Disisi *supply*, Ranney menjelaskan kelas pekerjaan di Parlemen menyediakan untuk karir politik seperti jam kerja yang fleksibel, keterampilan politik, status sosial dan kontak politik. Disisi *demand*, Jacob menjelaskan karir parlementer difasilitasi dengan pekerjaan yang menggabungkan fleksibilitas dari waktu ke waktu, tunjangan karir, kemandirian profesional, keamanan finansial, jaringan publik, status sosial, pengalaman kebijakan dan keterampilan dalam kehidupan politik.

Perempuan minoritas kurang terwakili di Parlemen dikarenakan sibuk konsentrasi kepada pekerjaan terampil dan semi terampil dengan gaji rendah, atau dalam bisnis keluarga kecil dengan jadwal yang tidak fleksibel dan jam kerja yang lama serta di sektor yang tidak menyediakan jalan untuk maju di kehidupan politik.

Dalam setiap partai elit mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada anggota, sedangkan anggota partai mempunyai status yang lebih tinggi daripada masyarakat atau pemilih. Parlemen didominasi oleh kelas pekerjaan yang profesional seperti wartawan, pengacara, pengusaha bisnis mandiri, konsultan keuangan, dosen, dengan penghasilan yang cukup untuk berkarir di dalam dunia politik.

b. Pendidikan

Ranney menjelaskan pada sisi permintaan yaitu anggota partai memilih orang yang memiliki pendidikan lebih baik dikarenakan kemampuan dan status sosial ingin memilih yang lebih baik. Pada sisi penawaran, pendidikan dapat berpengaruh pada proses perekrutan melalui motivasi dan sumber daya. Pendidikan menjadi salah satu indikator dalam meningkatkan pengetahuan politik, minat, kepercayaan diri dan keterampilan. Pengaruh pendidikan terus berlanjut setelah mengendalikan

pendapatan, walaupun pengaruh pada kampanye kurang terlihat jelas dibandingkan dengan cara partisipatif lainnya.

c. Jenis kelamin

Pada sisi permintaan, pengaruh gender pada perekrutan menggunakan prasangka langsung atau tidak langsung terhadap perempuan. Vallance berpendapat bahwa partai enggan mencalonkan perempuan pada kursi yang dapat dimenangkan karena para pemilih berprasangka yang kurang percaya terhadap kandidat perempuan, mereka takut bahwa perempuan mungkin akan kehilangan suara. Anggota partai laki-laki dan perempuan yang dipercaya seperti generasi yang lebih tua mendeskrinasikan kandidat perempuan. Masalah utama yang paling penting adalah pemilih tidak antusias dengan kandidat perempuan. Pemilih melihat kandidat perempuan bahwa perempuan tidak memiliki komitmen yang sama seperti laki-laki. Pemilih takut bahwa perempuan tidak bisa diprediksi.

Pada sisi penawaran, pembagian kerja yang konvensional dalam keluarga, pemisahan di pasar tenaga kerja, diharapkan perempuan memiliki sumber daya waktu dan uang yang lebih rendah dan tingkat ambisi politik yang lebih rendah. Bochel dan Denver menjelaskan pada sisi penawaran untuk sedikitnya politisi perempuan yaitu apabila lebih banyak perempuan maju untuk mengejar karir parlemen maka lebih banyak akan dinominasikan.

Jenis kelamin dapat berhubungan dengan efek status perkawinan dan anak-anak. Pada keseimbangan kandidat yang sudah menikah jelas berbeda posisi dengan mereka yang masih lajang.

d. Ras

Banyak orang yang merasa curiga terhadap orang kulit hitam. Banyak hal-hal salah yang dikatakan tentang orang kulit hitam di Partai Buruh. Standar ditetapkan yang dianggap sebagai perwakilan dan pemimpin. Orang berkulit hitam hanya memiliki peran tertentu yang mendukung.

e. Usia

Dalam hal usia kandidat yang lebih muda sangat termotivasi untuk naik jabatan yang lebih tinggi di politik. Usia dapat mempengaruhi pada sisi permintaan, mereka yang mencari kursi hingga akhir usia 30an mungkin lebih baik dipecah karena akan memiliki waktu untuk membuat catatan aktivitas politik, pengalaman layanan publik dan jaringan partai yang baik.

2. Sumber Daya

a. Waktu

Sumber daya didefinisikan sebagai aset yang dapat digunakan untuk keuntungan dalam mengejar karir politik seperti waktu, uanga, pengalaman politik, jaringan sosial. Yang paling penting dalam sumber daya adalah waktu karena di kantor adalah menuntut yang membutuhkan kehadiran rapat, acara sosial dan

penggalangan dana, berbicara di depan umum dan kampanye di lokal serta pemilihan umum.

b. Keuangan

Biaya yang terkait dengan terpilihnya anggota parlemen seperti perjalanan, pakaian, penelitian lokal, akomodasi, sesi pelatihan dan konferensi partai membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Calon yang bepergian ke seluruh negeri untuk melakukan wawancara membayar dengan uang sendiri. Kandidat harus memenuhi pengeluaran pribadi dalam merawat konstituensi sebelum kampanye. Termasuk pengeluaran langsung seperti komunikasi dan transportasi, perawatan anak atau bantuan rumah. Sumber daya keuangan mempengaruhi penawaran daripada permintaan, mereka yang tidak memiliki penghasilan yang tinggi mungkin mereka merasa tidak mampu dalam membayar investasi keuangan yang diperlukan untuk mendapatkan tempat duduk terutama mengingat resiko kegagalan dalam pemilihan umum.

c. Pengalaman Politik

Pengalaman politik juga menjadi sumber daya penting lainnya. Anggota yang sudah memiliki jabatan publik dapat diharapkan untuk mengembangkan keahliannya dalam politik. Berbicara tentang keterampilan, pengetahuan praktis dari pemerintah dan juga kontak sosial akan menjadi sangat berguna dalam mendapatkan tempat duduk.

d. Jaringan Pendukung

Jaringan pendukung dapat menjadi sumber informasi, saran, dan dukungan langsung. Kami mengharapkan orang-orang yang mendapat dukungan luas dari teman dekat, anggota partai, agen partai, kelompok masyarakat, rekan bisnis, serikat buruh dan pengusaha, serta langsung mereka keluarga, akan lebih cenderung mempertimbangkan karir parlementer, dan lebih baik ditempatkan untuk mendapatkan tempat duduk yang bagus.

3. Motivasi

a. Ambisi Politik

Banyak orang yang memiliki sumber daya tetapi hanya beberapa orang yang memilih berkarir di politik. Adanya kombinasi sumber daya dengan motivasi menghasilkan sesuatu yang diperlukan untuk kandidat. Faktor motivasi dijelaskan sebagai psikologis untuk terlibat aktif dalam politik. Aktivisme dalam ambisi politik tingkat tinggi dengan minat dan keyakinan.

Enam kategori utama pelamar dimotivasi oleh karir pribadi, ideologi, pelayanan publik, pesta pembawa standar, masalah tunggal. Kandidat yang diasumsikan dengan motif karir pribadi akan lebih ambisius daripada mereka yang berdiri karena alasan lain.

b. Dorongan

Dorongan menjadi lebih penting, kandidat yang ada lebih gigih diharapkan akan lebih berhasil. Salah satu kesulitan utama dalam tahap awal adalah mempertahankan motivasi.

1.5.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perempuan Dalam Politik

Norris dan Lovenduski (1995) mengidentifikasi dua faktor penawaran/*supply* dan permintaan/*demand* yang menyebabkan kurangnya keterwakilan perempuan. Penjelasan yang paling umum yaitu pada faktor penawaran, perempuan tidak maju atau tidak tertarik dalam politik. Sedangkan untuk faktor permintaan terkait dengan pemilih, atau partai politik yang dimana pihak-pihak tertentu mendiskriminasikan nominasi perempuan.

Norris dan Inglehart (2000: 3) menemukan dalam budaya tradisional, perempuan merasa enggan untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik dan elit politik. Oleh karena itu, faktor penawaran dan permintaan mungkin bertanggungjawab atas kurangnya perwakilan perempuan. Bukan sekedar menuduh partai politik yang diskriminasi terhadap kandidat perempuan, para pemimpin perempuan juga prihatin tentang masalah perempuan yang tidak mau tertarik dalam dunia politik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi representasi:

1. *Supply*/Struktural/Penawaran

a. Faktor budaya dan agama

Budaya menekankan moral, ketergantungan politik itu kurang terhadap gambaran perempuan. Gambaran perempuan ini mengurangi keberpihakan dan rasa efektivitas politik yang mengakibatkan peran perempuan dalam politik itu kurang. Ketidaksetaraan gender dalam representasi politik menunjukkan bahwa faktor politik, sosial ekonomi dan budaya memainkan peranyang paling berpengaruh (Moore dan Shackman, 1996; Paxton, 1997; Matlanda, 1998; Kenworthy & Malami, 1999). Dalam budaya yang menghargai laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, perempuan mungkin tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan diri untuk mencari kekuatan dalam dunia politik.

Perempuan termotivasi untuk mengejar pekerjaan tertentu sebagai panggilan melalui agama. Peran perempuan paling banyak pengaturan agama harus taat untuk tradisi agama dan keluarga. Agama mendukung harapan keluarga, karena agama dapat merekrut anggota baru. Untuk menunjukkan dampak langsung dan tidak langsung dari agama terhadap perempuan, doktrin agama perlu ditangani. Ajaran agama bertanggungjawab untuk menciptakan dan memperkuat kebiasaan yang ada kontribusinya terhadap rendahnya status perempuan di Indonesia.

b. Kondisi sosial ekonomi bangsa

Ada alasan lain untuk menduga bahwa ketidaksetaraan gender politik akan dipengaruhi oleh tingkat pembangunan ekonomi negara. Richard Matland (1998, 114) menyatakan bahwa ketika negara menjadi lebih maju maka perempuan semakin meningkat terlibat aktif dalam semua bidang kehidupan publik. Pembangunan harus meningkatkan politik perempuan dan mengurangi hambatan aktivitas politik. Pengembangan dapat menyebabkan melemahnya nilai-nilai tradisional, penurunan tingkat kesuburan, peningkatan urbanisasi, pendidikan dan angkatan kerja yang lebih besar partisipasi untuk perempuan dan perubahan sikap dalam persepsi peran yang tepat untuk perempuan.

Pembangunan menjadi faktor penting ketika perempuan mencapai tingkat status sosial yang sama dengan laki-laki dalam hal melek huruf, partisipasi angkatan kerja dan akan dianggap sama dengan laki-laki di dunia politik. Semakin kaya negara, semakin banyak waktu luang untuk perempuan memiliki dukungan teknologi yang tersedia untuk pekerjaan mereka.

Pengembangan dapat menunjukkan beberapa kebebasan dari tugas sehari-hari untuk individu yang diharapkan akan meningkatkan secara positif jumlah perempuan yang tersedia untuk jabatan politik (Paxton, 1997 : 448). Kurangnya waktu luang adalah satu penjelasan bahwa perempuan kelas bawah menghadapi

hambatan terbatasnya waktu. Beberapa dapat membeli dengan uang dan kesetaraan bukan masalah bagi mereka. Kekayaan dan kelas individu mengizinkan perempuan untuk memperkerjakan perempuan lain untuk pengasuhan anak dan kegiatan rumah tangga. Negara yang memiliki kelas tinggi sangat terbagi struktur perempuan kaya, perempuan kelas atas sering terlibat aktif dalam politik karena mereka mampu menyewa pelayan untuk anak-anak mereka.

c. Pendidikan

Kemajuan perempuan dalam dunia politik tergantung pada tingkat kemajuan yang mereka lakukan di luar politik (Randall, 1987; Chafetz, 1991). Bidang yang paling penting adalah pendidikan. Banyak perempuan yang tidak memiliki akses pendidikan yang diperlukan untuk posisi politik yang setara dengan laki-laki. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan politik. Wade dan Seo (1996, 44) mengatakan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi akan menjadi lebih sadar politik dan lebih tegas serta aktif diskusi dan partisipasi dalam dunia politik.

d. Pekerjaan

Profesional menguntungkan posisi dalam artian berpendidikan tinggi seperti berbicara di depan umum serta akrab dengan sistem politik dan hukum. Banyaknya perempuan dalam pekerjaan profesional maka semakin besar dalam pembagian

perempuan di parlemen. Kesempatan politik perempuan cenderung bergantung pada aktivitas tenaga kerja. Perempuan yang bekerja di luar rumah akan cenderung berpartisipasi lebih aktif di politik.

Pekerjaan dapat menyediakan dana untuk membantu meluncurkan kampanye politik dan menghasilkan kontak politik. Perempuan yang termotivasi dan terhubung dengan baik bersedia bekerja di kantor kemungkinan akan menghasilkan peningkatan jumlah wakil perempuan yang terpilih.

2. Faktor Permintaan (Demand) / Politik

a. Nature of the regime/Sifat rezim

Sifat dari rezim adalah penting kekuatan warga negara. Kekurangan demokratis juga dikaitkan sebagai rintangan untuk kemajuan perempuan di dunia politik karena negara demokratis memiliki lebih banyak sikap liberal terhadap kekuatan rakyat. Matland dan Taylor (1997) berpendapat bahwa meskipun masyarakat patrimonial dengan peran dominan untuk laki-laki pencapaian signifikan Kosta Rika perempuan dalam politik. Perempuan di Kosta Rika memegang sejumlah posisi pemerintahan yang tinggi. Kondisi dan budaya sosial ekonomi masih menjadi kendala perempuan.

Moore dan Shackman (1996) menemukan korelasi positif yang demokratis negara yang memiliki lebih banyak jumlah perempuan di lembaga legislatif daripada negara yang non

demokratis. Jumlah kandidat perempuan adalah dengan dipengaruhi secara negatif oleh sifat rezim.

b. *Political culture*/Budaya Politik

Partai politik bukan hanya sumber kekuasaan dan pengaruh tetapi juga dianggap sebagai pengatur waktu karena memiliki kekuatan untuk mencalonkan kandidat (Norris, 1997: 218). Organisasi partai sentral memiliki banyak hal pengaruh atas nominasi kandidat dan berkomitmen untuk termasuk lebih banyak perempuan.

c. *Electoral systems*/Sistem Pemilihan

Ada bukti kuat yang menunjukkan pengaruh struktur sistem pemilihan untuk meningkatkan jumlah perempuan di legislatif. Norris dan Lovenduski (1995) berpendapat bahwa sistem pemilihan dengan tinggi jumlah kursi memfasilitasi masuknya perempuan. Sistem pemilihan mungkin adalah fasilitator, tetapi tentu saja tidak kondisi yang cukup untuk tingkat representasi perempuan yang tinggi.

d. Kursi / kuota cadangan

Penggunaan kursi atau kuota cadangan yang disediakan untuk kelompok minoritas cukup umum dan perempuan mendominasi di kelompok ini. Perempuan mendapatkan akses melalui kuota, tidak berarti dapat bertindak secara independen untuk mempengaruhi kebijakan. Kuota melakukan pembatasan

dan dibenarkan bahwa mengarah pada peningkatan pesat perempuan dalam politik. Untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan representasi perempuan di parlemen, banyak negara menerapkan mekanisme ini. Hal ini sebagai transisi mekanisme untuk meletakkan bagi penerimaan yang lebih luas terhadap perwakilan perempuan.

4.3 Kuota 30% Bagi Caleg Perempuan.

Banyaknya yang berbicara tentang seputar kuota 30% bagi perempuan di lembaga legislatif menjadi sebuah pembicaraan yang sangat ramai serta ditetapkannya UU Pemilu :

Bab VII pasal 65 ayat 1: “Setiap partai politik peserta dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”

Dalam pemenuhan kuota 30% ini bagi perempuan di lembaga legislatif tidak bersifat wajib dengan alasan partai politik merasa belum siap dan jumlah kader perempuan masih sedikit. Ini merupakan ajakan yang bersifat *affirmatif* untuk partai politik dalam memperhatikan keterwakilan 30%. Pihak lain berpendapat bahwa kuota 30% bagi perempuan ini justru dianggap merendahkan martabat kaum perempuan karena perempuan dianggap memperoleh posisi jabatan di lembaga legislatif hanya karena kuota 30% atau belas kasihan dari pemerintah bukan melalui persaingan yang sehat.

Ann Oakley (Koirudin, 2004: 43) berpendapat bahwa perbedaan gender yang lahir di masyarakat membuat peran, perilaku, dan aktifitas kurang

mendukung kaum perempuan untuk ikut aktif berpartisipasi didalam politik. Dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa masalah ini tidak hanya struktural namun terjadi secara kultural di dalam masyarakat. Pentingnya kuota 30% bagi perempuan sebagai tindakan untuk menghadapi masalah struktural dan kultural tersebut.

Dengan adanya keterwakilan kuota 30% perempuan ini membuat dampak yang sangat positif bagi perempuan. Perjalanan untuk mencapai 30% ini merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Banyak yang bilang bahwa suatu alat yang baik itu tergantung pemakainya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam politik

a. Kualitas Kandidat

Kualitas kandidat adalah karakteristik yang dimiliki oleh kandidat yang memungkinkan baginya untuk dipilih dalam jabatan politik dan menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang politisi (Jacobson dan Kernell 1983), namun demikian belum ada indikator yang baku untuk mengukur kualitas kandidat. Kualitas ataupun kompetensi politik, menurut Almond dan Verba, dipengaruhi oleh partisipasi ataupun pengalaman politik sebelumnya, antara lain partisipasi dalam keluarga, sekolah maupun pekerjaan. Lebih lanjut Almond dan Verba (1989: 301) menyatakan bahwa pengaruh partisipasi dalam keluarga, sekolah dan pekerjaan terhadap kompetensi bersifat kumulatif. Semakin aktif dalam

politik, semakin baik kompetensinya. Menurut Jacobson dan Kernell (1983), kualitas kandidat diukur dari pengalaman politik sebelumnya.

(Titin Purwaningsih, 2014 : 9) Kualitas kandidat meliputi tiga variabel yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik yang dimiliki oleh kandidat. Pengalaman politik dalam penelitian ini dilihat dari tiga aspek, yaitu aktivitasnya dalam partai politik, pengalaman dalam organisasi, dan pengalaman dalam pekerjaan sebelumnya.

b. Ada beberapa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perempuan untuk terlibat aktif di dalam politik yaitu (Hud, 2008):

i. Pendapatan (*income*)

Status dan pendidikan menjadi faktor yang sangat penting didalam proses partisipasi. Setiap orang yang memiliki pendapatan yang tinggi, mempunyai status sosial yang tinggi dan mempunyai pendidikan yang bagus maka bisa dipastikan mereka lebih berpartisipasi secara aktif daripada orang yang memiliki pendapatan yang rendah serta berpendidikan dan berstatus sosial yang rendah (Budiardjo, 1982: 1).

ii. Tingkat status sosial ekonomi yang tinggi (pendidikan, pekerjaan, penghasilan)

Ketiga komponen tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk terciptanya partisipasi yang tinggi. Pendapat seperti ini berdasarkan dari pemikiran bahwa orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas serta

memahami kehidupan politik yang selanjutnya mereka pasti terlibat aktif dalam dunia politik. Dalam kemampuan penghasilan yang tinggi maka akan memberikan kesempatan yang luas untuk terlibat aktif di kehidupan politik (Raul, 1999: 7-10).

iii. Kultur yang ada di Indonesia

Kultur di Indonesia cenderung menempatkan kepada sektor-sektor domestik saja. Dengan begitu menyebabkan perempuan lebih lambat untuk masuk di dunia politik dibandingkan dengan laki-laki. Secara umum perempuan masuk di dalam dunia politik tidak untuk berminat menjadi politisi, waktu untuk belajar politik menjadi lebih lama, serta banyak anggota partai yang cenderung memilih keluarga daripada sepenuhnya berkarir secara aktif di dunia politik. Kendala lain yaitu terjebak dalam kepentingan perempuan, kepentingan partai terkadang berbanding terbalik dengan kepentingan perempuan dalam politik (Jurnal Perempuan, 133)

iv. Dalam partai politik penempatan perempuan dalam posisi kurang strategis.

Perempuan tidak ditempatkan dalam posisi pengambilan keputusan yang cukup penting. Dengan ini mengakibatkan perempuan tidak terlibat aktif akan perannya meskipun mereka adalah anggota partai.

v. Faktor agama

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam dunia politik di Indonesia yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan di dunia politik.

Melihat dari faktor-faktor diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pekerjaan, pendidikan, kultur status sosial dan agama dapat mempengaruhi seseorang dalam dunia politik. Sama saja dengan perempuan ketika pendidikan tinggi dan status sosial tinggi maka dia akan terlibat aktif di dunia politik sedangkan perempuan yang tingkat pendidikan dan sosial rendah maka hanya berpartisipasi sebagai pemilih saja bukan seorang yang dipilih (calon).

1.6 Definisi Konseptual

Defenisi konseptual dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan istilah yang ada dalam pokok masalah peneliti.

1. Partai Politik

Secara umum partai politik merupakan suatu kelompok yang tersusun secara sistematis serta anggota-anggota didalamnya memiliki tujuan dan cita-cita untuk memajukan partainya menjadi lebih baik.

2. Rekrutmen

Rekrutmen merupakan suatu cara untuk memilih seseorang dalam mengisi jabatan. Sedangkan rekrutmen politik merupakan cara

memilih individu yang dianggap memiliki kemampuan yang berbakat untuk menduduki jabatan di dalam politik.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu lembaga yang berguna untuk memilih wakil rakyat untuk dapat mewakili kepentingan rakyat.

4. Kuota 30% Perempuan Dalam Parlemen

Dengan ditetapkan kuota 30% bagi perempuan ini setiap partai diharapkan mampu memenuhi ketentuan tersebut. Namun dengan adanya kata diharapkan tersebut membuat partai berfikir bahwa itu tidak wajib dengan berbagai alasan yang setiap partai itu memiliki alasan yang berbeda-beda.

1.7 Definisi Operasional

Dengan demikian, untuk mengetahui rekrutmen calon legislatif perempuan dalam memenuhi kuota 30% di Partai Keadilan Sejahtera, maka akan dilihat sebagai berikut :

1. Rekrutmen Politik Caleg Perempuan PKS dilihat dari :

-Supply :

- a. Latar belakang sosial : kelas pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, ras, usia.
- b. Sumber daya : waktu, keuangan, pengalaman politik, jaringan pendukung.
- c. Motivasi : ambisi, dorongan.

-Demand :

- a. Mekanisme rekrutmen
 - b. Pola rekrutmen caleg perempuan
 - c. Kebijakan Partai
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam politik
- a. *Supply*/struktural : faktor budaya dan agama, kondisi sosial ekonomi bangsa, pendidikan, pekerjaan.
 - b. *Demand*/politik : nature of the regime, budaya politik, sistem pemilihan, kursi/kuota.
 - c. Kualitas kandidat : pendidikan, pelatihan, pengalaman politik
 - d. Faktor yang mendukung dan menghambat

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Bodgan dan Taylor mengatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti tulisan atau ucapan serta perilaku orang-orang yang diamati. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, bisa merasakan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari (Moleong, 2009: 3). Nasution juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif yaitu kegiatan mengamati seseorang dalam kehidupannya, berusaha untuk mengerti bahasa serta

maksud mereka tentang dunia yang ada disekitarnya dan berinteraksi secara langsung dengan mereka (Nasution, 2003: 5).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas tentang definisi penelitian deskriptif kualitatif, dapat digarisbawahi bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang didalamnya melibatkan seorang peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan orang yang bersangkutan untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek-obyek penelitian kemudian ditafsirkan dengan menggunakan data deskriptif.

Penelitian mengenai rekrutmen calon legislatif perempuan dalam memenuhi kuota 30% di Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi DIY ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta langsung yang ada di lapangan yaitu di DPW PKS Yogyakarta untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang diteliti.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Gambiran No.43, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163. Alasan memilih tempat lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin lebih mengetahui secara detail faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

1.8.3 Unit Analisis

Hamidi menyatakan bahwa unit analisis merupakan satuan yang akan diteliti dimana bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005: 75). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Unit Analisis Organisasi. Unit analisis organisasi dalam penelitian ini adalah Kantor DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan subjek darimana data diperoleh. Jenis data yang digunakan yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara peneliti terjun langsung atau melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Penelitian turun langsung ke DPW PKS Kota Yogyakarta untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk seperti rekaman hasil wawancara dengan berbagai sumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti dengan menggunakan buku-buku, artikel-artikel, referensi internet, dan

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Keterwakilan Caleg Perempuan. Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan menjelaskan tentang orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan, kepedulian dan kebulatan-kebulatan yang dialami di masa lalu lalu kebulatan tersebut diproyeksikan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang untuk mengubah serta memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (Moleong, 2009: 186).

Peneliti melakukan metode wawancara terstruktur kepada narasumber yaitu menggunakan suatu pedoman wawancara yang didalamnya berisi pertanyaan yang diajukan secara spesifik yang ingin digali dari narasumber. Narasumber yang diwawancarai: *Pertama*, Ir. Arief Boediono selaku Ketua MPW PKS DIY. *Kedua*, Sri Yatmi, S.Pd.,M.Pd selaku Caleg Perempuan DPRD DIY Daerah Pemilihan 2.

b. Dokumentasi

Arikunto berpendapat bahwa dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data yang berupa buku, catatan, transkrip,

majalah, surat kabar, agenda, notulen, rapot dan lain sebagainya (Arikunto, 2006: 158). Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dari dokumen tertulis maupun elektronik dari Kantor DPW PKS Kota Yogyakarta. Teknik dokumen diperlukan untuk mendukung kelegkapan data yang lain.

c. Teknik Analisa Data

Proses analisa data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, menganalisa data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisaan data tersebut. Dalam penelitian ini tahapan dalam mengolah data sebagai berikut (Moleong, 2004):

a. Pengelompokan data

Pengelompokan data ini dilakukan untuk menentukan data-data yang penting yang terkait dengan tema/topik dari proposal penelitian ini yaitu Rekrutmen Politik Caleg Perempuan Dalam Memenuhi Kuota 30% di Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DIY Tahun 2019.

b. Reduksi data

Peneliti melakukan pemilihan data yang masih diperlukan ataupun data yang sudah tidak diperlukan.

c. Interpretasi

Peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang sudah dipilih untuk dijadikan bahan dalam pembuatan proposal ini.

d. Uji Keabsahan Data Dengan Triangulasi

Menurut Moleong (2004) Triangulasi adalah teknik menguji keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.

e. Kesimpulan

Peneliti menentukan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di dalam proposal penelitian.

f. Publikasi/display berupa tulisan

Setelah memperoleh kesimpulan, peneliti akan melakukan publikasi atau display terhadap hasil dari penelitian ini dalam bentuk jurnal *online*.